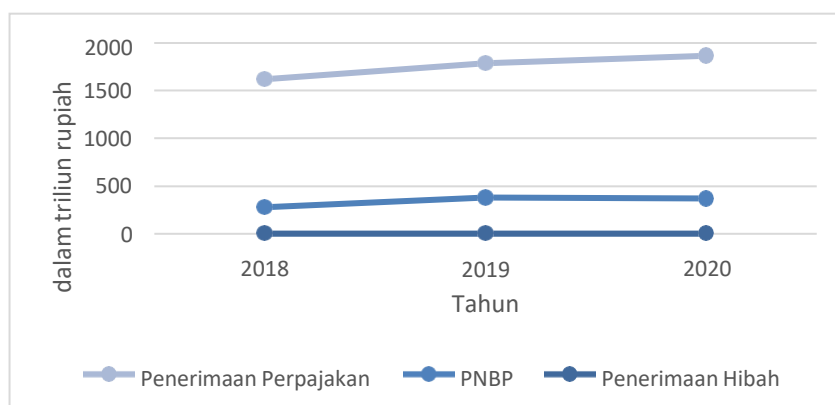


## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu proses yang terus berlanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu aspek terpenting yang dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan pembangunan nasional, untuk memastikan kelancaran pembangunan nasional adalah sumber dana. Sumber dana terbesar yang dapat menopang pembangunan nasional dan berperan penting dalam kehidupan bernegara salah satunya adalah pajak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan pada pemerintah memiliki peranan yang besar dalam pendanaan negara. Berdasarkan *website* resmi Kementerian Keuangan jumlah pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 sebesar Rp2.233,2 triliun dengan nilai penerimaan pajak sebesar Rp1.865,7 triliun, PNBP sebesar Rp367,0 triliun dan hibah sebesar Rp0,5 triliun. Meski terjadi perubahan APBN tiap tahunnya, pendanaan yang berasal dari penerimaan pajak tetap merupakan kontribusi dana terbesar.



Gambar 1 Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak, PNBP, dan Hibah dalam APBN dari tahun 2018-2020

Sumber data : Kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak terdiri dari berbagai macam dana dengan kontribusi yang utamanya berasal dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan penopang dana terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan dengan nilai Rp685,9 triliun dalam APBN 2020. Besarnya nilai Pajak Pertambahan Nilai yang mencapai 36,7% dari total nilai penerimaan pajak dalam pendanaan negara menunjukkan besarnya pengaruh PPN dalam menunjang aktivitas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga negaranya yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, pertahanan dan lain-lain.

. Pajak dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang berarti dapat dibebankan pada orang lain atau pihak ketiga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia terdiri dari 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk penyerahan untuk ekspor kena pajak. Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan pemerintah ialah sistem *self assesment* yang berarti wajib pajak diberi kebebasan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri nilai pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak.

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, pertanian, serta transportasi dan dalam menjalankan usahanya telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, seluruh kegiatan perajakannya mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai-nya diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dalam penerimaan pajak dalam APBN dan dengan kewajiban yang dibebankan pada PT XYZ untuk menghitung sendiri Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada perusahaan, akan menimbulkan resiko yang tinggi baik bagi perusahaan dan negara apabila terjadi kesalahan dalam proses pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Rumitnya proses transaksi Pajak Pertambahan Nilai di PT XYZ, membuat PT XYZ menggunakan jasa konsultan pajak Pratama Wahana Konsultan untuk mengerjakan aktivitas perpajakannya.

Atas dasar penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan Praktikum Kerja Lapangan dan mempelajari bagaimana PT XYZ memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya. Maka dari itu penulis memutuskan untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ oleh KKP Pratama Wahana Konsultan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan untuk PT XYZ adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis perusahaan di PT XYZ dan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak Pratama Wahana Konsultan?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ di Pratama Wahana Konsultan?
3. Bagaimana proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ di Pratama Wahana Konsultan?
4. Bagaimana proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ?

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai Perajakannya pada PT XYZ adalah untuk :



1. Menguraikan proses bisnis perusahaan di PT XYZ dan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak Pratama Wahana Konsultan.
2. Menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ di Pratama Wahana Konsultan.
3. Menguraikan proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai P T XYZ di Pratama Wahana Konsultan.
4. Menguraikan proses ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai PT XYZ.

#### 1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis berguna untuk menambah informasi mengenai bagaimana proses pemenuhan kewajiban perpajakan pada perusahaan, terutama Pajak Pertambahan Nilai serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai fungsi dan tugas Kantor Konsultan Pajak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penulis  
Dengan menulis Tugas Akhir ini, penulis diharapkan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di bangku kuliah ke dalam praktik kerja yang sesungguhnya di bidang perpajakan dan akuntansi.
  - b. Kantor Konsultan Pajak Pratama Wahana Konsultan  
Hasil pengamatan yang dilakukan penulis bermanfaat bagi KKP Pratama Wahana Konsultan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan rencana kerja Kantor Konsultan Pajak agar dapat memaksimalkan pelayanan serta kinerja staff agar dapat membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - c. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor  
Hasil pengamatan bermanfaat untuk menambah referensi atau acuan bagi penulis selanjutnya khususnya mahasiswa/i jurusan akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor yang berniat melakukan pengamatan yang serupa.